

Implementasi SIMBADA Melalui Program MBKM Untuk Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Aset di Pemerintahan Daerah

Maulidia¹, Citra Lutfia²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Universitas Trunojoyo Madura
e-mail: 1maulidiala.244@gmail.com, 2lutfia.thatha@gmail.com

Article History

Received: 1 Juli 2025

Revised: 3 Juli 2025

Accepted: 14 Juli 2025

DOI: <https://doi.org/10.58794/jdt.v5i2.1575>

Kata Kunci – MBKM, SIMBADA, BMD, aset tetap

Abstract – The Independent Industrial Campus Learning Internship Program (MBKM) is a practical learning effort designed to improve student competency through direct experience in the regional government environment. This service activity aims to analyze the implementation of the Regional Property Management Information System (SIMBADA) through the MBKM program in order to increase the effectiveness of asset management in regional government agencies in the Madura region. The method used is Field Work Practice (PKL) with a Participatory Action Research (PAR) approach, which actively involves students in the asset administration process, starting from data input, recapitulation, to reviewing Regional Property (BMD). The results of the activity show that student involvement in SIMBADA operations provides an in-depth understanding of asset management policies and procedures, as well as increasing the accuracy and regularity of asset data at partner agencies. This program contributes significantly to increasing the effectiveness of regional asset management by simplifying the process of recording and monitoring assets. The practical output of this program is in the form of increasing human resource capacity and improving the quality of asset data which supports transparency and accountability in the management of regional property. Thus, the implementation of SIMBADA through the MBKM program not only enriches student learning experiences, but also provides a sustainable positive impact on the management of local government assets.

Abstrak – Program Magang Industri Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan upaya pembelajaran praktis yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui pengalaman langsung di lingkungan pemerintahan daerah. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) melalui program MBKM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan aset di instansi pemerintahan daerah di wilayah Madura. Metode yang digunakan adalah Praktek Kerja Lapangan (PKL) dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yang melibatkan mahasiswa secara aktif dalam proses administrasi aset, mulai dari input data, rekapitulasi, hingga review Barang Milik Daerah (BMD). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam operasional SIMBADA memberikan pemahaman mendalam terkait kebijakan dan prosedur pengelolaan aset, sekaligus meningkatkan akurasi dan keteraturan data aset di instansi mitra. Program ini berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan aset daerah dengan mempermudah proses pencatatan dan pengawasan aset. Luaran praktis dari program ini berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta perbaikan kualitas data aset yang mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah. Dengan demikian, implementasi SIMBADA melalui program MBKM tidak hanya memperkaya pengalaman belajar mahasiswa, tetapi juga memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi pengelolaan aset pemerintah daerah.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan lembaga yang memiliki otoritas untuk mengatur urusan bangsa dan negara [1]. Sebagai entitas pelapor, pemerintah wajib menyusun laporan keuangan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan publik [2]. Salah satu bentuk implementasi nyata dari otonomi daerah adalah pengelolaan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu sendiri [3]. Aset ini secara finansial dan juga mencakup sumber daya non-keuangan yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan layanan publik, termasuk yang dipelihara karena mengandung nilai historis dan kultural [4]. Aset daerah sendiri merupakan bagian dari kekayaan yang dimiliki pemerintah daerah, mencakup barang bergerak maupun tidak bergerak, yang pendanaannya berasal dari APBD secara penuh ataupun sebagian [5]. BMD ini mencakup semua barang yang dibeli atau didapati lewat dana dari APBD atau dari sumber sah lainnya yang sesuai aturan [6].

Beberapa daerah masih mengalami kesulitan dalam mengelola aset, seperti masalah administrasi, kurangnya transparansi, dan pemanfaatan aset yang belum sesuai kebutuhan. Akibatnya, aset daerah belum mampu mendukung peningkatan PAD dan pelayanan publik secara optimal. SIMBADA yang seharusnya membantu pengelolaan aset, juga belum sepenuhnya digunakan, terutama di beberapa wilayah di Madura. Wilayah tersebut dipilih karena memiliki kebutuhan mendesak untuk memperbaiki tata kelola aset dan meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan BMD. Pengelolaan aset yang buruk bisa merugikan dan menghambat pembangunan. Sebaliknya, pengelolaan yang baik mendukung keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Proses pengelolaan aset ini tidak bisa asal-asalan harus melalui tahapan yang jelas, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, sampai pengamanan, supaya aset yang dimiliki instansi atau lembaga pemerintah tetap terjaga dan dimanfaatkan dengan baik [7]. Prosesnya terdapat serangkaian prosedur dan langkah teknis yang harus dipatuhi agar aset milik daerah dikelola dengan maksimal, rapi, dan sesuai aturan [8]. Optimalisasi aset perlu diawali dengan menghimpun seluruh jenis aset, baik bergerak maupun tidak bergerak, melalui proses inventarisasi, penilaian, dan analisis potensi secara menyeluruh [9].

Menurunnya PAD mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset melalui proses lelang sebagai upaya bagi barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan salah satunya dengan cara dijual [10]. Langkah ini dilakukan agar aset yang tidak terpakai tetap memberikan manfaat dan tidak menjadi beban daerah. Pengelolaan BMD yang tepat tidak hanya menjaga tertib administrasi, tetapi juga memastikan setiap aset memberikan nilai tambah bagi kas pada pendapatan asli daerah (PAD), termasuk melalui pemanfaatan, penjualan atau lelang serta penghapusan aset yang tidak digunakan. Hal ini mencerminkan rendahnya efisiensi pemanfaatan aset dan lemahnya kontrol internal, yang berdampak pada akurasi dan keandalan laporan keuangan daerah [11]. Pengelolaan aset yang optimal memastikan keberlangsungan operasional, meminimalkan risiko kerusakan, serta meningkatkan nilai dan umur manfaat aset [12]. Penghapusan barang milik daerah dilakukan melalui penerbitan keputusan kepala daerah yang menetapkan secara resmi bahwa barang tersebut tidak lagi menjadi aset daerah [13]. Tanpa penghapusan, aset daerah yang tidak terpakai justru akan menambah beban biaya pemeliharaan dan pengelolannya [14].

Pengelolaan aset tetap juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, sekaligus memberikan nilai tambah, karena aset tersebut merupakan bagian dari kekayaan daerah secara langsung mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah. Aset adalah elemen yang dapat dikelola secara optimal untuk menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan suatu daerah [15]. Nilai aset yang umumnya menjadi komponen terbesar dalam neraca memengaruhi keseluruhan struktur laporan keuangan. Pengelolaan yang tertib dan transparan, pemerintah daerah dapat memantau penggunaan aset secara optimal, untuk mencegah penyalahgunaan, serta memastikan aset tetap memberikan manfaat jangka panjang. Tak hanya itu, aset-aset daerah ini juga krusial untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Aset yang tersedia sesuai kebutuhan akan mendukung peningkatan kinerja OPD dalam melayani masyarakat dan menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif [16].

Sistem informasi dikembangkan untuk menyempurnakan sistem manual yang sudah ada, dengan harapan modernisasi ini meningkatkan produktivitas tanpa menghilangkan fungsi dari sistem sebelumnya [17]. SIMBADA sendiri merupakan komponen krusial dalam mendukung transparansi, ketepatan, dan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. SIMBADA sendiri merupakan aplikasi terpadu yang dirancang untuk mendukung tugas staf Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam merencanakan, mengelola administrasi, menginventarisasi, serta menyusun laporan terkait aset atau barang milik daerah [18]. Pemberian kode unik serta pencatatan lokasi dan penanggung jawab aset membantu meminimalkan risiko kehilangan atau kesalahan penempatan [19]. Penyusunan laporan neraca keuangan juga didasarkan pada data yang dikelola melalui sistem ini. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan aset di kalangan pemerintah daerah merupakan hasil dari reformasi regulasi di tingkat

nasional maupun daerah, serta meningkatnya tuntutan terhadap pelaporan keuangan yang transparan dan pelaksanaan otonomi daerah yang efektif.

2. METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode Praktek kerja Lapangan (PKL). Pendekatan yang diterapkan dalam kegiatan ini menggabungkan pendekatan berbasis *Participatory Action Research* (PAR). PAR (*Participatory Action Research*) melibatkan pelaksanaan penelitian untuk mendefinisikan sebuah masalah maupun menerapkan informasi ke dalam aksi sebagai solusi atas masalah yang telah terdefinisi [20]. Dalam konteks pengabdian ini, metode PAR adalah pilihan yang tepat karena menekankan bahwa mahasiswa magang dan mitra harus terlibat secara aktif sebagai subjek dan pelaku perubahan. Dengan demikian, PAR memungkinkan pembelajaran yang interaktif dan berpikir kritis. Solusi yang dihasilkan harus aplikatif dan berkelanjutan dan tidak hanya teoritis. Metode ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik dalam pengelolaan aset daerah yang menuntut partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, PAR membantu menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan yang kompleks dan dinamis. Akibatnya, program MBKM meningkatkan efektivitas pelaksanaan SIMBADA dalam pengelolaan aset daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 (empat) bulan, mulai Februari hingga Juni 2025, tim pengabdian memperoleh secara langsung tantangan yang terjadi dalam dunia kerja, khususnya dalam pengelolaan aset daerah serta implementasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA). Tim pengabdian terlibat dalam berbagai tugas sub bidang dalam bidang administrasi aset seperti pemanfaatan aset, pengamanan aset, perencanaan aset, penatausahaan aset, pemindahtanganan aset, dan penghapusan aset. Kegiatan ini memberikan peluang bagi tim pengabdian untuk menerapkan teori yang sudah dipelajari dengan konteks nyata dalam dunia kerja. Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan ini terdiri atas beberapa tahapan meliputi Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Evaluasi. Gambar 1. Menjelaskan alur tahapan kegiatan magang industri MBKM :



Gambar 1. Alur tahapan kegiatan magang industri MBKM

1. Pendaftaran dan Penetapan

Tahap awal ini mencakup proses pendaftaran dimana calon peserta magang mengumpulkan berkas dan dokumen pendukung sesuai ketentuan dari jurusan dan pihak mitra. Proses ini penting untuk memastikan kesesuaian peserta dengan kebutuhan program magang. Calon peserta magang akan melalui proses seleksi oleh tim pelaksana MBKM. Penetapan dilakukan berdasarkan kriteria seleksi yang objektif untuk menjamin kualitas peserta dan pengumuman penetapan mahasiswa sebagai peserta magang industri MBKM dilakukan setelah pelaksanaan seleksi berakhir.

2. Pembekalan

Peserta magang yang terpilih kemudian mengikuti kegiatan pembekalan yang diarahkan oleh tim pelaksana. Pembekalan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta agar dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja dan memahami tugas serta tanggung jawab selama pelaksanaan magang berlangsung. Pada tahap ini, peserta magang diberikan materi terkait etika kerja, alur kerja, serta panduan penyusunan *output* hasil dari kegiatan magang.

3. Orientasi Kerja

Orientasi kerja merupakan proses pengenalan peserta magang terhadap lingkungan kerja, struktur organisasi, budaya perusahaan, serta standar operasional prosedur yang berlaku. Tahapan ini berfungsi sebagai jembatan adaptasi agar peserta magang dapat melaksanakan kegiatan magang secara efektif dan efisien dalam lingkungan kerja yang baru.

4. Partisipasi dan Diskusi

Peserta magang mulai terlibat langsung dalam kegiatan operasional dan diskusi kelompok maupun individual. Partisipasi ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan praktis, kemampuan *problem solving*, dan komunikasi *interpersonal* yang relevan dengan bidang kerja magang. Kegiatan operasional meliputi berbagai aktivitas administrasi aset, termasuk pengamanan dan pemanfaatan aset, perencanaan dan penatausahaan aset, serta pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) dalam menginput dan *mengentry* data aset rusak 2024 rekapan data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sesi diskusi bersama pembimbing lapangan di perlukan dalam mengevaluasi kendala peserta magang dan mencari solusi bersama.

5. Penyusunan *Output* Magang

Pada tahap ini, peserta magang melaksanakan penyusunan *output* magang yang terdiri dari laporan akhir magang, artikel penelitian/pengabdian, dan video dokumenter yang menjadi bukti kontribusi, pemahaman, pengalaman selama periode magang. *Output* ini berfungsi sebagai bukti capaian kompetensi serta media evaluasi efektivitas program magang dalam meningkatkan kompetensi peserta dan memberikan manfaat bagi instansi mitra.

6. Penilaian

Tahap akhir melibatkan evaluasi kinerja peserta selama periode magang. Evaluasi dilakukan oleh pihak mitra secara menyeluruh untuk menilai pencapaian tujuan magang dan memahami dampak dari kegiatan tersebut. Melalui diskusi secara langsung meliputi aspek teknis, sikap dan hasil kerja. Penilaian dilakukan oleh pembimbing lapangan untuk memberikan umpan balik konstruktif dan menentukan keberhasilan peserta dalam mengikuti program magang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

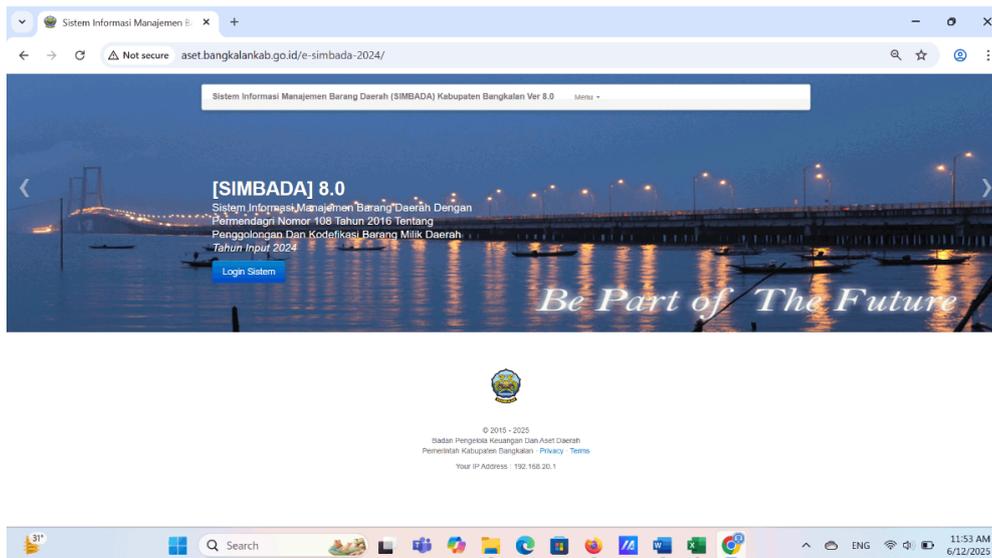
Program magang industri Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan di instansi pemerintahan daerah memberikan pengalaman praktis sekaligus membuka ruang pembelajaran kritis bagi mahasiswa mengenai tata kelola aset publik di era digital. Melalui keterlibatan langsung dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA), SIMBADA merupakan aplikasi yang berfungsi untuk mencatat dan memonitor aset tetap secara administratif serta memberikan informasi terkini mengenai kondisi aset. Mahasiswa dapat memahami bagaimana teknologi informasi berperan sebagai instrumen reformasi birokrasi, khususnya dalam meningkatkan efisiensi pencatatan, akurasi data, dan transparansi pengelolaan aset daerah. Pengalaman magang ini memperkuat kemampuan analitis dan teknis mereka, tidak hanya dalam mengoperasikan sistem, tetapi juga dalam memahami logika kebijakan dan prinsip akuntabilitas publik. Mereka belajar mengenai regulasi, tanggung jawab administratif, serta pentingnya validitas data, sehingga kegiatan ini menjadi jembatan transformatif antara teori akademik dan praktik kelembagaan yang sesungguhnya.

Sementara itu, bagi institusi pemerintahan, kehadiran mahasiswa magang bukan sekadar sebagai tenaga tambahan administratif, melainkan sebagai mitra strategis yang mampu memberikan perspektif baru, menyegarkan pola kerja, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia lokal melalui transfer pengetahuan. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem pembelajaran dua arah antara dunia pendidikan dan dunia kerja yang berkontribusi positif terhadap adaptasi teknologi dan perbaikan prosedur internal.

Secara menyeluruh, implementasi SIMBADA telah memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat proses administratif, mengurangi duplikasi data, dan menciptakan jejak digital yang dapat diaudit. Keunggulan ini meningkatkan efisiensi sekaligus menjadi fondasi transparansi pengelolaan aset publik. Namun, keberhasilan SIMBADA sangat bergantung pada konsistensi input data, kemampuan operator, dan pemahaman regulasi pengguna di tingkat SKPD. Oleh karena itu, implementasi sistem ini bukan hanya tantangan teknis, tetapi juga membutuhkan kesiapan struktural dan budaya kerja yang mendukung integritas serta keterbukaan. Program magang ini pun berperan penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang berbasis digital dan akuntabel, sejalan dengan semangat transformasi pelayanan publik yang mengedepankan efektivitas, efisiensi, dan partisipasi aktif seluruh elemen birokrasi. Berikut beberapa prosedur penting yang perlu diperhatikan dalam proses menginput data aset pada Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA), antara lain mencakup :

1. Log in SIMBADA

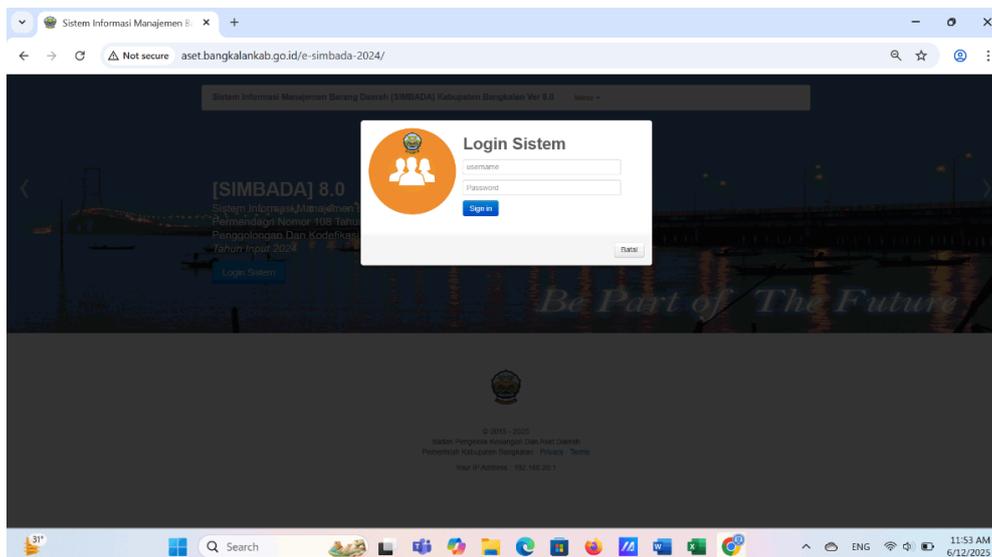
Proses awal dalam pemanfaatan sistem SIMBADA menuntut perhatian pada dinamika antarmuka yang berubah mengikuti tahun anggaran berjalan. Hal ini mencerminkan sifat sistem yang adaptif terhadap kebutuhan administratif yang terus berkembang. Oleh karena itu, bukan sekadar akses ke laman tertentu yang menjadi titik krusial, melainkan pemahaman bahwa sistem ini bersifat temporal dan memerlukan pembaruan data secara berkala. Kebutuhan akan akurasi dan relevansi informasi menuntut pengguna untuk bersikap responsif terhadap pembaruan sistem, sekaligus menyadari bahwa pengelolaan data aset bukanlah aktivitas statis, melainkan bagian dari siklus manajerial yang terus bergerak. Gambar 2. Merupakan tampilan laman SIMBADA.



Gambar 2. Tampilan laman SIMBADA

2. Masukkan *username* dan *password*

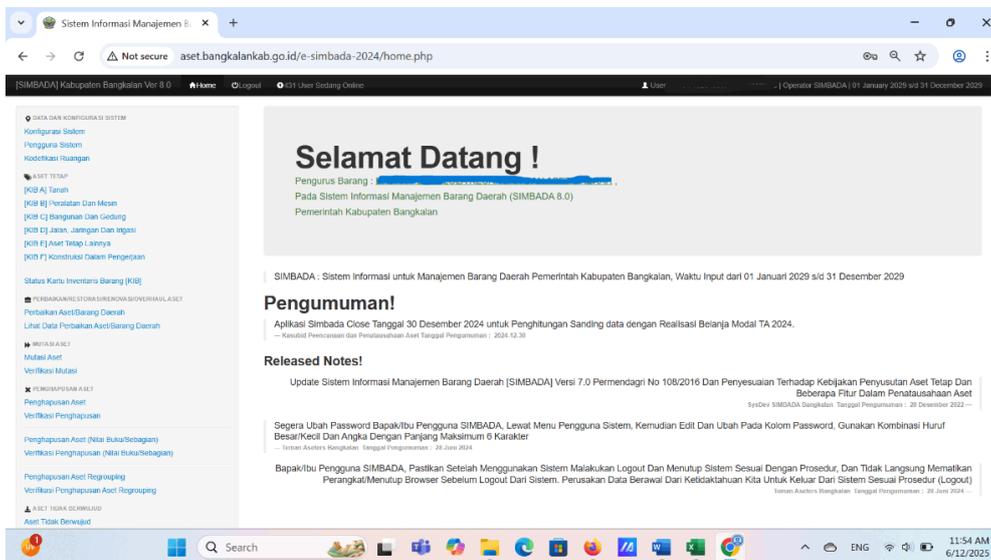
Tahapan *autentikasi* dalam sistem SIMBADA, yang secara umum diwujudkan melalui proses *login* oleh operator SKPD, tidak hanya merupakan prosedur administratif semata, tetapi mencerminkan pentingnya pengelolaan identitas digital dalam sistem informasi aset. Di balik proses ini, terdapat dinamika yang kerap kali menimbulkan kendala seperti ketidaksesuaian *username* atau perubahan kata sandi yang mengindikasikan masih adanya ketergantungan pada mekanisme yang rentan terhadap *human error*. Permasalahan seperti ini menekankan pentingnya tata kelola informasi pengguna yang responsif dan sistem pendukung yang efisien, termasuk peran verifikator sebagai penghubung dalam penyelesaian hambatan teknis. Gambar 3. Merupakan tampilan *login* pada SIMBADA. Dengan demikian, proses *login* bukan sekadar akses menuju sistem, melainkan bagian dari ekosistem koordinasi dan kontrol yang lebih luas dalam pengelolaan aset daerah.

Gambar 3. Tampilan proses *login* pada SIMBADA

3. Masuk ke SIMBADA

Tampilan beranda SIMBADA mencerminkan kompleksitas dan cakupan luas dari sistem informasi aset daerah. Kehadiran berbagai menu mulai dari klasifikasi aset tetap, pengelolaan mutasi, hingga pelaporan kerusakan dan penghapusan menandakan upaya sistematis dalam membingkai siklus hidup aset secara menyeluruh. Gambar 4. Merupakan tampilan beranda SIMBADA. Pengelompokan menu ini bukan semata fitur fungsional, tetapi cerminan dari bagaimana pemerintah daerah membangun arsitektur data yang memungkinkan transparansi, akuntabilitas, dan

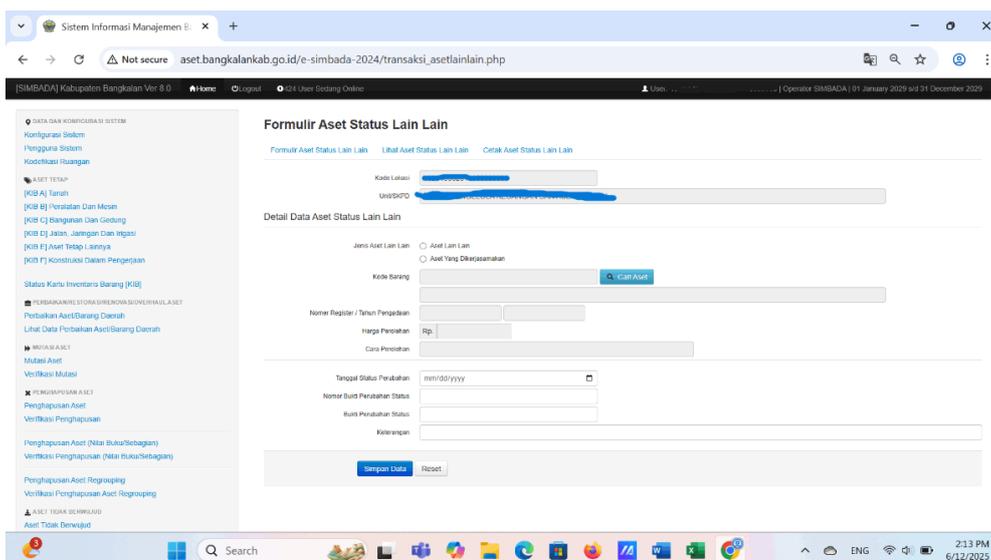
pengambilan keputusan yang berbasis informasi. Beranda ini, pada dasarnya, menjadi titik masuk untuk membaca bagaimana logika manajerial diterjemahkan ke dalam struktur sistem digital, sekaligus menjadi pengingat bahwa teknologi informasi bukan hanya alat bantu administratif, tetapi instrumen strategis dalam tata kelola aset publik.



Gambar 4. Tampilan beranda SIMBADA

4. Pengisian data aset lain-lain

Masuknya data ke dalam kategori “aset lain-lain” di SIMBADA menunjukkan adanya ruang klasifikasi yang bersifat residual kategori yang menampung aset-aset yang tidak terakomodasi dalam penggolongan utama. Dalam konteks ini, formulir yang tersedia bukan hanya menjadi sarana input administratif, melainkan mencerminkan bagaimana sistem mengakomodasi kompleksitas realitas di lapangan yang sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan struktur kategorisasi yang kaku. Pengisian data berdasarkan rekapan dari BPK, dengan pilihan status seperti “aset lain-lain” atau “aset yang dikerjasamakan,” menuntut ketelitian serta pemahaman atas status hukum dan administratif dari masing-masing aset. Gambar 5. Merupakan tampilan formulir aset lain-lain. Proses ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pencatatan digital dan dokumen legal formal, sekaligus menunjukkan bagaimana sistem informasi publik berfungsi sebagai arena negosiasi antara standarisasi teknis dan kenyataan birokratis.

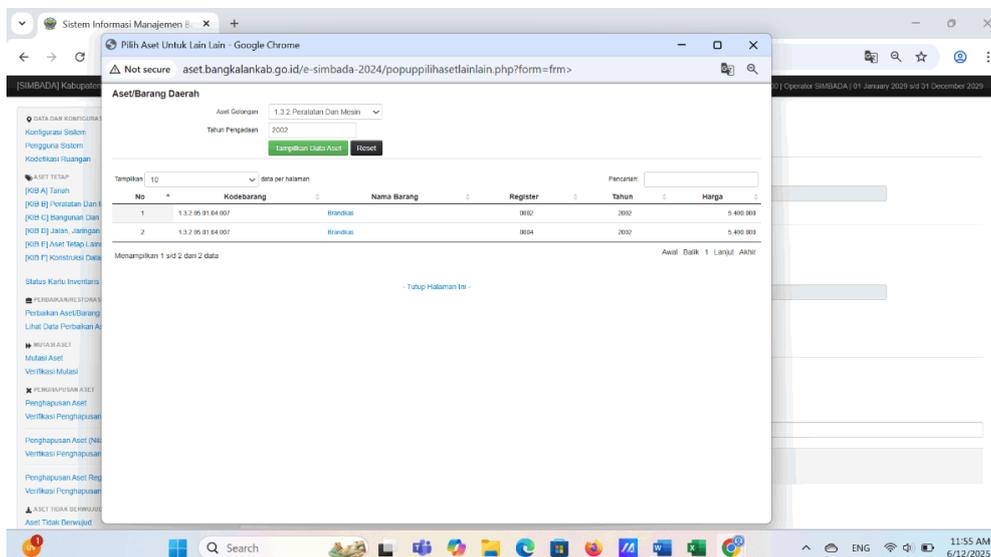


Gambar 5. Tampilan formulir aset lain-lain

5. Melengkapi data aset lain-lain

Proses pelengkapan data aset dalam sistem SIMBADA tidak sekadar menuntut pengisian format formal seperti yang tercantum dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), melainkan mencerminkan praktik klasifikasi yang berupaya menjaga konsistensi antara pencatatan administratif dan kondisi riil aset. Kategori aset yang dibagi ke dalam enam golongan merupakan bentuk upaya standarisasi, namun dalam praktiknya, proses ini kerap bersinggungan dengan

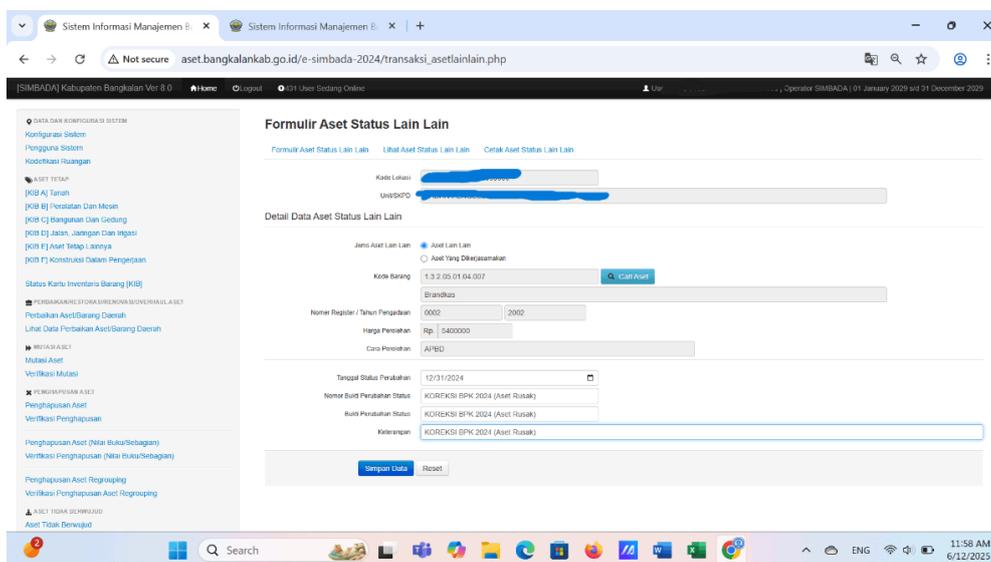
kompleksitas data historis, seperti ketidaksesuaian antara kode barang, nama barang, atau tahun perolehan. Di sinilah letak pentingnya akurasi data dan kemampuan sistem untuk memfasilitasi pencocokan secara presisi, karena setiap entri bukan hanya sekadar isian teknis, tetapi representasi dari validitas dan legalitas penguasaan aset. Ketelitian dalam proses ini menjadi cerminan dari tanggung jawab birokrasi terhadap transparansi dan akuntabilitas publik, bukan semata pemenuhan kewajiban administratif. Gambar 6. Merupakan tampilan melengkapi data aset.



Gambar 6. Tampilan melengkapi data aset

6. Penginputan data aset lain-lain

Tahapan pencatatan perubahan status aset dalam SIMBADA mencerminkan bagaimana sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi, tetapi juga sebagai instrumen koreksi dan akuntabilitas. Ketika sebuah aset mengalami pergeseran status seperti kerusakan yang diidentifikasi melalui hasil audit BPK maka pencatatan digital menjadi sarana untuk menegaskan kembali integritas informasi yang tercantum dalam basis data pemerintah daerah. Pencantuman keterangan seperti “Koreksi BPK 2024 (Aset Rusak)” bukan sekadar pelabelan administratif, melainkan bagian dari proses validasi yang mempertemukan hasil pengawasan eksternal dengan pembaruan internal sistem. Gambar 7. Merupakan tampilan penginputan data aset. Di titik ini, pengelolaan data aset tidak lagi berdiri sebagai aktivitas teknis belaka, melainkan menjadi bagian dari mekanisme reflektif atas dinamika kepemilikan dan kondisi aset, yang pada akhirnya mendukung transparansi, akurasi, dan pertanggungjawaban dalam tata kelola keuangan publik.



Gambar 7. Tampilan penginputan data aset

7. Verifikasi aset lain-lain

Verifikasi atas data yang telah diinput dalam sistem SIMBADA menjadi tahap krusial dalam menjamin validitas informasi aset. Lebih dari sekadar langkah akhir, proses ini merepresentasikan komitmen terhadap integritas data dan mekanisme kontrol internal yang terdesentralisasi, di mana setiap pengguna memiliki tanggung jawab langsung atas kebenaran informasi yang dicatat. Verifikasi per item tidak hanya berfungsi sebagai konfirmasi administratif, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban personal dalam rantai pengelolaan aset publik. Data yang telah diverifikasi kemudian diteruskan untuk ditindaklanjuti oleh operator dan verifikator di tingkat SKPD, memperlihatkan adanya model kolaboratif dalam tata kelola berbasis sistem. Gambar 8. Merupakan tampilan verifikasi data aset.

ID	Kode Barang	Nama Barang	Thn/Reg	Harga	Cara Perolehan	Keterangan	Tanggal/No Bukti	Status	Options
1	1.3.1.01.01.02.001	Tanah Bangunan Pagar	2004/0001	1.897.660.216,00	PRIMEJUALAN	ADENDUM	01 Januari 2023 /		Verifikasi
1	1.3.2.01.03.04.002	Periode Generating Set	2012/0001	1.294.843.700,00	APBD	ADENDUM	01 Januari 2023 /		Verifikasi
1	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	2012/0007	349.876.587,00	APBD	ADENDUM	01 Januari 2023 /		Verifikasi
1	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	2012/0008	349.876.587,00	APBD	ADENDUM	01 Januari 2023 /		Verifikasi
1	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	2012/0009	349.876.587,00	APBD	ADENDUM	01 Januari 2023 /		Verifikasi
1	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	2012/0010	349.876.589,00	APBD	ADENDUM	01 Januari 2023 /		Verifikasi
1	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	2012/0011	349.945.682,00	APBD	ADENDUM	01 Januari 2023 /		Verifikasi
1	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	2012/0012	349.945.682,00	APBD	ADENDUM	01 Januari 2023 /		Verifikasi
1	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	2012/0013	349.945.682,00	APBD	ADENDUM	01 Januari 2023 /		Verifikasi
1	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	2012/0014	349.945.686,00	APBD	ADENDUM	01 Januari 2023 /		Verifikasi

Gambar 8. Tampilan verifikasi data aset

Penutup dari seluruh rangkaian ini tidak hanya ditandai oleh proses keluar dari sistem, tetapi juga menegaskan pentingnya kedisiplinan prosedural dalam menjaga stabilitas teknis SIMBADA. Meskipun tampak sepele, proses *logout* yang tidak sesuai prosedur dapat berimplikasi pada gangguan sistemik, mengindikasikan bahwa aspek teknis dalam sistem informasi juga menuntut kepatuhan birokratis. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi teknologi dalam sektor publik tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi juga oleh budaya administratif yang konsisten dan bertanggung jawab.

4. SIMPULAN

Program Magang Industri Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diselenggarakan di instansi pemerintahan daerah wilayah Madura memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengenal dan mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA). Melalui program ini, mahasiswa berperan aktif dalam proses penginputan dan *entry* data ke dalam sistem SIMBADA sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sistem ini memfasilitasi pengelolaan aset yang tertib dan efisien, serta menyediakan data akurat dan lengkap yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan, khususnya neraca.

Meskipun demikian, untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan efektivitas pengelolaan aset, disarankan agar instansi mitra secara rutin mengadakan pelatihan lanjutan terkait penggunaan SIMBADA bagi seluruh pengguna barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pelatihan ini akan memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola data aset secara konsisten dan akurat. Selain itu, direkomendasikan pula pengembangan sistem *monitoring* dan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi kendala operasional serta mengimplementasikan perbaikan secara berkesinambungan. Dengan demikian, program MBKM tidak hanya memberikan manfaat praktis bagi mahasiswa, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah yang lebih transparan, *akuntabel*, dan berkelanjutan.

5. SARAN

Pengalaman yang diperoleh selama pelaksanaan magang tidak hanya memperkaya pengetahuan akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman serta keterampilan mahasiswa terkait pengelolaan aset daerah. Selama pelaksanaan pengabdian di instansi pemerintah, pemanfaatan teknologi terkini menjadi inovasi penting yang mempermudah proses pengelolaan aset. Oleh karena itu, diharapkan pembaca dapat memahami pentingnya peran SIMBADA dalam pengelolaan aset sebagai strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di lingkup pemerintah daerah. Aset berperan penting dalam perumusan kebijakan

daerah terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara angka, aset dalam neraca menjadi bagian terbesar dari keseluruhan aset daerah. Kolaborasi yang sinergis antara pemerintah daerah dan masyarakat pun menjadi kunci dalam mengoptimalkan pengelolaan aset demi kemajuan daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan ucapan banyak terimakasih kepada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura, khususnya kepada seluruh tim panitia pelaksana Magang Industri Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 2024/2025 yang telah mengarahkan dan memberikan peluang bagi mahasiswa untuk berkontribusi melalui kegiatan magang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Hanifa and V. Amalia, "Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Oki," *J. Ilm. Akunt. Rahmadiyah*, vol. 6, no. 1, p. 34, 2023, doi: 10.51877/jiar.v6i1.258.
- [2] Iskandar Sam, Misni Erwati, and Muhammad Febriansyah, "Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarolangun," *Inisiat. J. Ekon. Akunt. dan Manaj.*, vol. 3, no. 2, pp. 90–104, 2024, doi: 10.30640/inisiatif.v3i2.2257.
- [3] E. R. Labasido and D. Darwanis, "Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (Dpkad) Provinsi Aceh," *J. Ilm. Mhs. Ekon. Akunt.*, vol. 4, no. 2, pp. 215–236, 2019, doi: 10.24815/jimeka.v4i2.12233.
- [4] S. Wartuny, "Analisis Pengelolaan Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya," *Kupna Akunt. Kumpul. Artik. Akunt.*, vol. 1, no. 1, pp. 22–33, 2020, doi: 10.30598/kupna.v1.i1.p22-33.
- [5] E. Noviawati, "Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah," *J. Ilm. Galuh Justisi*, vol. 4, no. 1, p. 47, 2016, doi: 10.25157/jigj.v4i1.410.
- [6] N. M. W. Premaiswari and K. Digidowiseiso, "Analisis Akuntabilitas Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Provinsi Bali," *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilm. Manaj. Bisnis dan Inov. Univ. Sam Ratulangi)*, vol. 10, no. 2, pp. 1260–1276, 2023, doi: 10.35794/jmbi.v10i2.50484.
- [7] Y. Ekawati, L. Syafina, and Y. S. J. Nasution, "Analisis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pengamanan Aset Tetap Kota Subussalam," *J. Sos. Ekon. Dan Hum.*, vol. 9, no. 3, pp. 349–356, 2023, doi: 10.29303/jseh.v9i3.400.
- [8] R. Rachmawati, D. Arwati, S. D. Herawati, and S. G. Arnan, "Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Penatausahaan Asset/ Barang Milik Daerah," *J. ASET (Akuntansi Riset)*, vol. 10, no. 2, pp. 189–198, 2018, doi: 10.17509/jaset.v10i2.15159.
- [9] A. Arifin, M. E. Perseveranda, S. Sia Niha, H. Manafe, R. Paulina Bibiana, and S. Man, "Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah dengan Pengawasan dan Pengendalian Sebagai Variabel Mediasi pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur," *J. Manaj. Pendidik. Dan Ilmu Sos.*, vol. 4, no. 1, pp. 359–369, 2023, doi: 10.38035/jmpis.v4i1.1438.
- [10] P. A. I. Landina, "Pelaksanaan Lelang Atas Barang Milik Daerah Melalui Internet (E-Auction) Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpknl) Semarang," *Diponegoro Law J.*, vol. 5, no. 2, pp. 1–18, 2016, [Online]. Available: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11296>
- [11] A. S. Putri, N. Q. Lutfillah, and S. Asmanu, "Praktik Pemanfaatan Manajemen Aset Tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang," *JIATAX (Journal Islam. Account. Tax)*, vol. 3, no. 2, p. 115, 2020, doi: 10.30587/jiatax.v3i2.2363.
- [12] Y. Cahyaningrum and Y. Sambharakreshna, "Optimalisasi Pengelolaan Aset Berbasis Web Dalam Peningkatan Efisiensi Dan Keberlanjutan," *INTECOMS J. Inf. Technol. Comput. Sci.*, vol. 7, no. 2, pp. 473–484, 2024, doi: 10.31539/intecom.v7i2.9864.
- [13] S. Harahap, Y. Lubis, and B. Hartono, "Kinerja Birokrasi Penghapusan Barang Inventaris Lainnya pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara," *J. Educ. Hum. Soc. Sci.*, vol. 5, no. 4, pp. 2945–2957, 2023, doi: 10.34007/jehss.v5i4.1671.
- [14] B. Yoseph Engelbertus Rumlus, Muhammad Sawir, and Iqbal Miftakhul Mujtahid, "Implementasi Kebijakan Penatausahaan Aset Daerah Di Kabupaten Mappi," *J. Ekon. Manaj. Sist. Inf.*, vol. 6, no. 1, pp. 47–55, 2024, doi: 10.38035/jemsi.v6i1.2845.
- [15] I. F. A. Aituarauw, "Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar," *J. Terap. Pemerintah. Minangkabau*, vol. 1, no. 2, pp. 99–110, 2021, doi: 10.33701/jtpm.v1i2.1998.
- [16] Rahmad Purwanto W, Christine Diah Wahyuningsih, and Rina Nuraini Selly, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah," *Mimb. Adm. FISIP UNTAG Semarang*, vol. 21, no. 1, pp. 137–151, 2024, doi: 10.56444/mia.v21i1.1516.
- [17] L. Syafina and S. Rika, "Analisis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah," *J. Ekon. dan Perbank. Syariah*, vol. 7, no. 30, pp. 1242–1253, 2022, [Online]. Available: <https://doi.org/10.30651/jms.v7i4.13406>
- [18] I. Lantemona, V. Ilat, and H. Manossoh, "Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud Insteng Lantemona 1), Ventje Ilat 2), Hendrik Manossoh 3)," pp. 211–221, 2017.
- [19] E. S. J. Surbakti, Y. Sembiring, Ardiansyah, and E. M. Nalien, "Pengelolaan Aset Melalui Simbada Di Kecamatan Medan Baru," *J. Mutiara Manaj.*, vol. 10, no. 1, pp. 1–8, 2025, [Online]. Available: <https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMM>
- [20] A. Rahmat and M. Mirmawati, "Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Aksara J. Ilmu Pendidik. Nonform.*, vol. 6, no. 1, p. 62, 2020, doi: 10.37905/aksara.6.1.62-71.2020.